

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat membawa dampak terhadap perubahan pendapatan per kapita masyarakat suatu negara menjadi meningkat dalam jangka waktu yang lama. Perubahan pendapatan per kapita tersebut juga diikuti dengan perubahan teknologi, pola pikir sampai dengan kelembangaan masyarakat di negara tersebut<sup>2</sup>. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lain untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad ialah pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakatnya, guna mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut<sup>3</sup>. Indonesia sebagai negara yang terbagi atas banyak provinsi dan memiliki jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia. Ditambah dengan sumber daya alam yang melimpah, di mana apabila kedua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas nasional.

Realitanya, bonus demografi Indonesia seakan bukan lagi sebagai peluang,

---

<sup>2</sup> Patta Rapana dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar : CV SAH MEDIA, 2017), hal.2

<sup>3</sup> Hadi Sumarsono, Nasikh dan Siti Muslikah, *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Malang : Gunung Samudera, 2017), hal. 5

justeru sebagai ancaman. Ancaman dipicu dari penambahan jumlah penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi. Keadaan juga semakin rumit dengan kehadiran tenaga kerja asing yang dapat menambah persaingan dunia kerja.

Padahal, jelas tertera pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) dimana setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak<sup>4</sup>. Tetapi, dari segi penerapan daripada pasal tersebut belumlah optimal dilaksanakan oleh pemerintah. Kendati dalam 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini, bukan berarti permasalahan ketenagakerjaan telah teratasi sepenuhnya. Dibalik *trend* penurunan tersebut, ternyata presentase pengangguran penduduk usia produktif Indonesia menempati posisi kedua terbesar di Asia Tenggara yaitu 5,01 % di pertengahan tahun 2019 . Menurut data BPS tersebut, Indonesia masih kalah jauh dari Laos dan Kamboja yang mencatatkan torehan cukup baik dengan presentase pengangguran sebanyak 0,60 % dan 0,10 % .<sup>5</sup>

**Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka
2014	5,94%
2015	6,18%

<sup>4</sup> Kementerian Riset dan Teknologi , “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum” dalam <https://jdih.ristekbrin.go.id/tentang-kami/> , diakses 14 November 2020

<sup>5</sup> Kaltim Today, “Data Terbaru, Pengangguran Indonesia Terbanyak Kedua di Asia Tenggara” dalam <https://kaltimtoday.co/data-terbaru-pengangguran-indonesia-terbanyak-kedua-di-asia-tenggara/> , diakses 14 November 2020

2016	5,61%
2017	5,50%
2018	5,34%
2019	5,28%

**Sumber : BPS Indonesia**

Pengangguran terbuka (penuh) menurut ILO (*Internasional Labor Organization*) ialah seseorang yang telah memasuki golongan usia kerja yang dalam periode tertentu tidak bekerja, bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan<sup>6</sup>. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang telah berusia berkisar antara 15-64 tahun<sup>7</sup>. Semakin tinggi presentase tingkat pengangguran terbukanya, maka mencerminkan bahwa banyak penduduk yang telah memasuki usia kerja tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Pengangguran menjadi permasalahan yang serius dan membawa berbagai dampak negatif, seperti menurunnya kesejahteraan dan kemakmuran yang tadinya menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu, pengangguran juga dapat mendorong peningkatan tindakan kriminalitas, tingkat kemiskinan, menurunkan kegiatan perekonomian, menurunkan daya beli dan masih banyak dampak negatif lainnya. Dalam jangka panjang, dampak pengangguran dapat membahayakan keberlangsungan hidup suatu negara.

Sehubungan atas dampak yang ditimbulkan akibat pengangguran, maka

<sup>6</sup> Syamsul Rivai, *Mari Belajar Ekonomi*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 85

<sup>7</sup> Yulius Eka Agung Saputra, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : Ekuilibria, 2016), hal.

tidak heran Islam melarang dan mencegah umatnya untuk menganggur dan menggantungkan diri dari belas kasihan dari orang lain melalui jalan meminta-minta, serta segala bentuk sikap yang serupa. Aspek kerja keras, usaha tanpa kenal lelah sangat ditekankan sebagai kewajiban umat Islam. Sehingga, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga bernilai ibadah. Yang bila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan pahala<sup>8</sup>.

Islam tidak mengijinkan umatnya seolah-olah tawakal, tetapi dia tidak mau berusaha mengubah hidupnya sendiri dengan bekerja, serta bermalas-malasan. Karena berfikir, rezeki telah diatur oleh Allah SWT dan tidak akan pernah tertukar. Padahal, tidak ada dasarnya sesuatu bisa datang sendiri, tanpa kita berusaha untuk menjemputnya. Dalam Firmannya Allah SWT memerintahkan umatnya untuk senantiasa beramal dan bekerja keras dengan niat untuk mendapat ridha' dari Allah SWT.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى  
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At Taubah [9] : 105)<sup>9</sup>.

Lebih lanjut lagi dalam ayat tersebut dijelaskan pula bahwasannya, setiap perbuatan yang dilakukan baik itu terlihat maupun tidak terlihat oleh

<sup>8</sup> Ahmad Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan Al Qur'an*, (Depok : Gema Insani, 2006), hal.284

<sup>9</sup> Naf'an Akhun, *Al Qur'an Terjemahan Depag PDF Interactive v201905*, (Semarang : CV Toha Putra, 2019), hal. 289

manusia akan dinilai oleh Allah SWT nanti kelak di akhirat. Serta apabila manusia bersungguh-sungguh maka akan menjadi hal positif . Karena Allah SWT tidak melihat hasilnya, melainkan proses kerja dan amalan manusia itu sendiri.<sup>10</sup>

Jawa Timur menjadi satu di antara delapan provinsi yang didirikan pertama kali dalam persejaraan Indonesia. Sebagai penopang perekonomian di wilayah bagian timur, provinsi ini memiliki peran yang sangat vital untuk 29 Kabupaten dan 9 Kota di dalamnya. Jawa Timur mempunyai populasi penduduk mencapai 36,69 juta di tahun 2019 sebagai yang terbesar kedua, setelah provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu, situasi Jawa Timur juga tak jauh berbeda dengan situasi nasional, yaitu menghadapi perkara-perkara mengenai ketenagakerjaan, sebagaimana perkara pengangguran terbuka.

**Grafik 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur**



<sup>10</sup> Muchlisin BK, "Isi Kandungan Surat At Taubah Ayat 105 dan Terjemahan" dalam <https://webmuslimah.com/isi-kandungan-surat-at-taubah-ayat-105/> , diakses 18 November 2020

### Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan grafik diatas tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur di tahun 2013 sebesar 4,30% menurun menjadi 4,19% di tahun 2014. Namun Provinsi Jawa Timur sempat mengalami kenaikan TPT di tahun 2015 mencapai 4,47 %. Kenaikan ini diketahui akibat dari banyaknya angkatan kerja yang menuju Provinsi Jawa Timur (urbanisasi) tetapi belum memperoleh pekerjaan. Adapun tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada golongan lulusan SMK yaitu sebesar 11,74%. Ketidaktepatan informasi antara penyedia lapangan pekerjaan dengan pihak pendidikan yang ditugaskan untuk mempersiapkan keahlian siswa.<sup>11</sup>

Tahun-tahun berikutnya TPT Jawa Timur cenderung mengalami penurunan . Mulai dari tahun 2016 sebesar 4,21% menurun menjadi 4% di tahun 2017. Lalu,turun 0,01 % menjadi 3,99% di tahun 2018, dan di tahun 2019 menurun kembali hingga 3,92%. Meskipun demikian, bukan berarti presentase tersebut mengisyaratkan bahwa pengangguran terbuka telah teratasi. Karena seseorang yang sudah bekerja dalam 1 jam dalam sehari, sudah tidak dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. Dilihat dari presentasenya, penurunannya tidak begitu signifikan.

*Trend* penurunan inipun disinyalir ada kaitannya dengan strategi pemerintahan Jawa Timur melalui berbagai program di tahun 2019 seperti *double track* SMA dan Madrasah Aliyah (MA), *Milenial Job Center* (MJC) dan *One Pesantren One Product* (OPOP). Walaupun begitu, berdasarkan

---

<sup>11</sup> Kanal Satu, "Tingkat pengangguran di Jatim capai 4,47% "dalam <https://kanalsatu.com> , diakses 1 Juli 2021

data BPS, beberapa Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tingkat pengangguran terbukanya justru mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2-3 tahun belakangan ini, seperti Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri , Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan lain-lain<sup>12</sup>.

Dari permasalahan tingkat pengangguran terbuka tersebut , maka diperlukan penelitian yang berkaitan faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur . Adapun daari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran, dalam penelitian ini mengambil beberapa variabel mulai dari angkatan kerja, upah minimum kabupaten atau kota, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk faktor yang pertama yang mempengaruhi pengangguran yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) sendiri adalah tenaga kerja yang sedang bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan dan pengangguran<sup>13</sup>. Dengan kata lain, mereka yang menjadi bagian penduduk telah masuk kategori produktif yang mana sudah bekerja, maupun belum bekerja, tetapi siap untuk bekerja.

Menurut Wahyuningsih, jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang besar juga. Berbagai teori dan kerangka empiris telah membuktikan bahwasannya tenaga kerja tidak hanya dipandang

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)” dalam <https://jatim.bps.go.id/indicator/6/54/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-jawa-timur.html> , diakses 1 November 2020

<sup>13</sup> Nugraha Setiawan, *Struktur Ketenagakerjaan Dan Partisipasi Angkatan Kerja di Pedesaan Indonesia : Analisis Hasil Sarkenast 2006*, Jurnal Kependudukan Padjajaran Vol.10 No.2 Juli 2008, hal. 100-111

sebagai satuan output, tetapi juga dapat berimbas kepada timbulnya permasalahan berkaitan dengan ketenagakerjaan dan turunnya pendapatan per kapita<sup>14</sup>.

Akselerasi penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya memicu lonjakan angkatan kerja baru, yang memicu pelonjakan jumlah angkatan kerja baru yang dapat menambah pula persoalan pengangguran dan persoalan kependudukan. Semakin banyak angkatan kerja baru, maka pengangguran juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan, penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, terlebih jumlah penduduk yang besar yang tidak diikuti dengan pemerataan penduduk, kualitas penduduk, struktur penduduk yang sebagian masih muda, modal dan teknologi yang dimiliki masih minim.<sup>15</sup>

Selain angkatan kerja, upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah minimum ialah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk menentukan imbalan yang diberikan kepada pekerjanya. Definisi upah minimum berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER-01-/MEN/1999 ialah upah paling rendah yang terbagi atas upah pokok dan tunjangan pokok<sup>16</sup>. Setiap Provinsi, Kabupaten maupun Kota mempunyai upah minimum yang berbeda-beda bergantung pada KHL (Kebutuhan Hidup Layak) maupun

---

<sup>14</sup> Eny Rochaida, *Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur*, Forum Ekonomi Volume 18 No.1 2016, hal. 14-24

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.14-24

<sup>16</sup> Sutasiyo Sutrisno Remi, et al, *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*, (Bandung : Unpad Press, 2015), hal. 52

aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh daerah tersebut<sup>17</sup>.

Penentuan besaran upah sangat mempengaruhi tingkat pengangguran yang terjadi. Menurut Alghofari, tenaga kerja telah menentukan tingkah upahnya dalam standar minimum tertentu. Apabila upah yang diterima oleh karyawan di suatu daerah itu rendah dibawah tingkat upah minimumnya, maka akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Dari segi pengusaha, apabila tingkat upah minimum meningkat, maka biaya yang dikeluarkan pengusaha tersebut juga akan terpengaruh, sehingga pengusaha akan berusaha untuk menekan biaya produksi akibat peningkatan upah dengan pengurangan tenaga kerja. Sehingga, menyebabkan jumlah pengangguran menjadi bertambah.<sup>18</sup> Seperti yang dijabarkan oleh Gilarso bahwa apabila upah naik dari sebelumnya, maka *supply* pekerja akan meningkat. Hal tersebut, dikarenakan pekerja cenderung memilih pekerjaan dengan tingkat upah yang tinggi. Sehingga, diharapkan pengangguran akan berkurang<sup>19</sup>.

Kota Surabaya menjadi wilayah di Jawa Timur yang mempunyai UMK tertinggi hingga mencapai Rp. 3.871.052,61 di tahun 2019. UMK tersebut mengalami peningkatan dimana di tahun sebelumnya UMK Kota Surabaya sebesar Rp. 3.583.312,61. Disisi lain, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten

---

<sup>17</sup> Yusi Sasonto dan Ronni R. Masman, *Executive Compensation Management*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2016), hal.17

<sup>18</sup> Ni Komang Sopianti dan A.A Ketut Ayuningsasi, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat inflasi dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali*, E-Jurnal EP Unud 2 [4] tahun 2013,hal. 216-225

<sup>19</sup> Yunani Tiya Kasanah, Anifatul Hanim, Edi Suswandi, *Faktor-faktor Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014*, e-journal Ekonomi Bisnis dan Akutansi Volume V(1) tahun 2018 ISSN : 2355- 4665, hal.21-25

Sampang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo dan sebagainya mempunyai UMK yang sama di tahun 2019 sebesar Rp. 1.763.267,65<sup>20</sup>. Kendati UMK Kabupaten-Kabupaten tersebut terendah diantara Kabupaten atau Kota di Jawa Timur , tetap saja angka tersebut lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi pengangguran adalah PDRB. Berdasarkan pendapat Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan secara bertahap dari kehidupan perekonomian yang mendorong peningkatan output yang dihasilkan baik barang dan jasa<sup>21</sup>. Samuelson mengatakan bahwa salah satu penunjuk angka pengangguran ialah Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikenal sebagai paramater untuk mengukur seberapa besar produktivitas dan penerimaan suatu wilayah regional (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, PDRB tiap daerah bergantung pada faktor-faktor penciptaan potensial dalam daerah tersebut.

Dalam pernyataannya, Putong memaparkan hubungan antara PDRB dengan tingkat pengangguran berdasarkan hukum Okun (*Okun's Law*). Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik benang merahnya yaitu terdapat hubungan negatif antara PDRB dengan tingkat pengangguran. Di mana apabila PDRB

---

<sup>20</sup> KOMINFO JATIM, "Besaran UMK Jatim Tahun 2019" dalam <https://http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemprov-jatim-tetapkan-besaran-umk-2019> , diakses 14 November 2020

<sup>21</sup> Syamsul Arifin, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Banyumas : Pena Persada, 2020), hal.9

di suatu daerah mengalami kenaikan, maka akan terjadi juga peningkatan penyerapan tenaga kerja daerah tersebut. Sehingga, pengangguran akan berkurang.

Bunyi teori Okun yang terdapat dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa,

Apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya , yang telah dicapai pada tahun tertentu, tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%.

PDRB menurut harga konstan 2010 Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Sempat mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2015, PDRB Jawa Timur kembali naik di tahun 2016 , turun lagi di tahun 2017 dan naik kembali di tahun 2018. Tingkat fluktuasi tersebut tak lepas dari kontribusi Kabupaten atau Kota di Jawa Timur<sup>22</sup>. Karena PDRB berkaitan dengan tingkat produktivitas suatu wilayah. Maka dapat ditelaah bahwa semakin tinggi PDRB , maka barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin banyak. Akhirnya, akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan terserap.

Telah dibahas sebelumnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang melimpah , yang perlu dioptimalkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, pembangunan dilakukan sebagai usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki kualitas dan daya saing. Jadi, merujuk pada produktivitas yang disertai

---

<sup>22</sup>Pramana Yoga dkk, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020* , (Surabaya : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020), hal.533

pemerataan, berkepanjangan dan pemberdayaan, serta bukan semata-mata untuk meningkatkan penghasilan penduduk saja<sup>23</sup>.

Perihal mengetahui kemajuan pembangunan manusia, UNDP memperkenalkan *Human Development Index*. HDI atau lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang dipergunakan untuk memaparkan bagaimana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan yang berhubungan dengan cara mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya<sup>24</sup>. IPM telah banyak mengalami revisi cara menghitungnya.

Pembangunan manusia adalah proses pembangunan yang mempunyai banyak tujuan, terkhusus dalam hal pendapatan, kesehatan dan pendidikan<sup>25</sup>. Hubungan antara pengangguran dengan *HDI* tak lain ialah pembangunan manusia menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Menurut Todaro dalam tujuan dari pembangunan manusia menjadi tujuan daripada pembangunan itu sendiri. Yang mana kunci dari pembangunan manusia menjadi untuk menciptakan kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan memacu kinerja, supaya membuahkan pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengangguran akan menjadi berkurang. Karena semakin baik kualitas manusia, maka pengetahuan dan

---

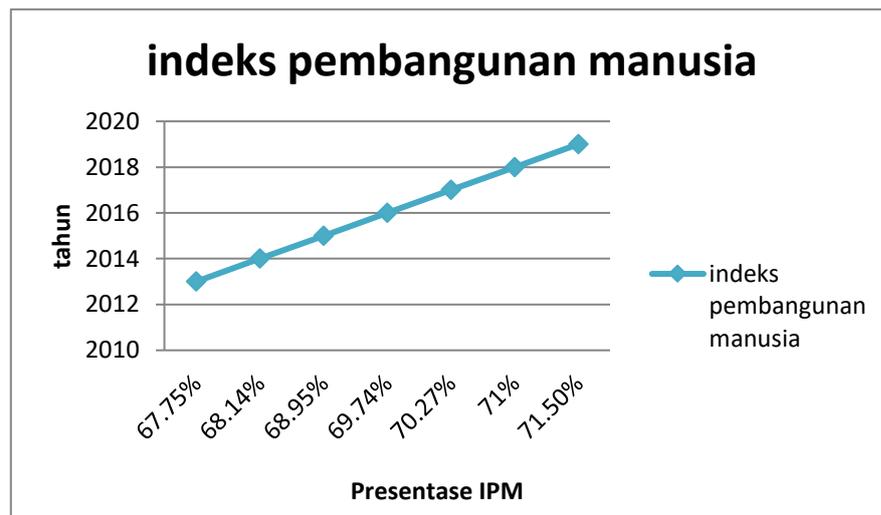
<sup>23</sup> Arfida Boedirochminarni dan Pera Sundarianingsih, *Modul Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Malang : UMMPress, 2019), hal.5

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “*Indeks Pembangunan Manusia*” dalam <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses 20 September 2020

<sup>25</sup> Ayu Noviatamara, Tiffany Ardina dan Nurisqi Amalia, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal REP Vol.4 No.1 tahun 2019, hal. 53-60

keahlian juga akan membaik pula.<sup>26</sup>

**Grafik 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur**



Berdasarkan grafik diatas, presentase indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur memang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi, jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah bahkan DIY, presentase IPM Jawa Timur masih terbilang kalah saing. IPM yang tergolong rendah dilatarbelakangi rata-rata lama sekolah Jawa Timur baru 7,39 tahun atau sepadan dengan tingkat SMP. Kekurangan asupan gizi pun juga melanda beberapa daerah di Jawa Timur, yang salah satunya adalah Kabupaten Sampang<sup>27</sup>. Mungkin beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan presentase IPM Jawa Timur masih kalah

<sup>26</sup> Reni Helvira dan Endah Putria Riski, *Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat*, JisEB Vol.1.No.1 tahun 2020, hal. 53-62

<sup>27</sup> KOMINFO JATIM, "Tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia Jatim 70,77" dalam <http://www.kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tahun-2018-indeks-pembangunan-manusia-jatim-70-77>, diakses 17 November 2020

denga provinsi lainnya.

Berlandaskan pemaparan diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan persoalan sukar yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia dengan judul “Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Upah Minimum, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian akan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2019.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun, namun tingkat pengangguran terbuka beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur justru mengalami peningkatan
2. Akselerasi pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur menjadi pemicu lonjakan angkatan kerja baru, yang berpotensi menambah jumlah pengangguran. Sementara penciptaan lapangan kerja baru cenderung lambat
3. Peningkatan upah yang ditetapkan oleh masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur membawa dampak baik dan buruk
4. PDRB Provinsi Jawa Timur yang fluktuatif dapat juga mempengaruhi tingkat pengangguran, karena PDRB berkaitan dengan tingkat

produktivitas suatu wilayah. Apabila meningkat, maka akan banyak tenaga kerja yang terserap, begitupun sebaliknya

5. Kualitas SDM Jawa Timur masih terendah diantara provinsi lain di Pulau Jawa, hal tersebut dapat tercermin dari IPM. Penyebab disinyalir karena rata-rata lama sekolah Jawa Timur sepaadan tingkat SMP, ditambah di beberapa daerah Jawa Timur mengalami kekurangan asupan gizi

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur?
2. Apakah tingkat upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur?
3. Apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur
4. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur?
5. Apakah angkatan kerja, tingkat upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan manusia berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur

2. Untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur
3. Untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur
4. Untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur
5. Untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya angkatan kerja, tingkat upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian berdasarkan teoritis, yakni digunakan untuk menambah variabel-variabel yang mempengaruhi pengangguran di Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah dilakukan penelitian yang serupa sebelumnya. Seperti variabel angkatan kerja, tingkat upah minimum, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia. Diantara variabel – variabel tersebut manakah yang paling mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian yang dilakukan akan dapat mempersembahkan sumbang asih pada mata kuliah ekonomi makro di bidang ketenagakerjaan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Untuk Pemerintah

Kegunaan bagi pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan, bisa menjadi referensi dan bahan evaluasi dalam permasalahan terkait dengan pengangguran. Lebih lanjut lagi, hasil penelitian pula diangankan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menetapkan strategi dalam mengentaskan dan upaya untuk mengurangi pengangguran

### b. Untuk Akademik

Diharapkan, penelitian yang dilakukan ini dapat membantu menambahi perbendaharaan, kepustakaan, referensi peneliti yang lain di perpustakaan di FEBI IAIN Tulungagung. Dan juga bisa diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran perekonomian terutama dalam bidang ekonomi makro

### c. Untuk peneliti yang selanjutnya

Penelitian ini bisa memberikan referensi dan keterangan tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama, dengan variabel dan tempat yang berbeda, ataupun ingin meneliti permasalahan dalam penelitian ini lebih lanjut dengan menggunakan periode yang lebih panjang

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Berikut ini terdapat beberapa variabel yang akan diujikan dala penelitian

saat ini, diantara lain :

1. Angkatan Kerja (X1)
2. Upah Minimum (X2)
3. PDRB (X3)
4. Indeks Pembangunan Manusia (X4)
5. Pengangguran Terbuka (Y)

Dengan demikian, akan dilaksanakan penelitian yang mencoba mengkaji dan analisis tentang variabel-variabel independen diatas terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2013-2019. Tidak semua variabel independen menjadikan penelitian yang dalam skripsi ini terbatas pada beberapa variabel independen saja.

Variabel lain yang tidak diujikan seperti tingkat pendidikan, inflasi, investasi, kurs, pengeluaran pemerintah dan lain-lain sebagainya. Selain itu, dalam karya tulis ini hanya meneliti tingkat pengangguran selama 5 tahun dan cukup sulit untuk menemukan data-data yang dapat mendukung. Sehingga, memerlukan kejelian untuk mencarinya satu persatu, karena variabel yang digunakan juga cukup banyak.

## **G. Penegasan Istilah**

1. Penegasan Secara Konseptual
  - a) Angkatan Kerja (X1)

Angkatan kerja menurut Tiandaru adalah sekumpulan orang dewasa yang sedang bekerja atau berusaha mencari pekerjaan<sup>28</sup>.

b) Upah Minimum (X2)

Dewan Penelitian Perubahan Nasional mendefinisikan upah sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan berfungsi sebagai penjamin keberlangsungan hidup yang layak. Baik bagi kemanusiaan maupun produk, serta dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang atas dasar persetujuan, undang-undang dan peraturan dalam suatu perjanjian pekerjaan antara kedua belah pihak<sup>29</sup>.

c) PDRB (X3)

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya<sup>30</sup>

d) Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Dalam glosarium istilah pemerintahan, IPM disebutkan sebagai piranti yang dapat diperuntukkan untuk mengukur bagian-bagian baik

---

<sup>28</sup> Syamsul Arifin, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Banyumas : Pena Persada, 2020), hal.23

<sup>29</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2010), hal.874

<sup>30</sup> Anisa Ilmi Faried, *Perekonomian Indonesia : Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*, (Medan : Yayasan Kita Menulis,2019), hal.81

itu otonomi dan pembangunan daerah. IPM seperti namanya, berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia.<sup>31</sup>

e) Pengangguran Terbuka (Y)

Nanga mendefinisikan pengangguran sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan<sup>32</sup>. Pengangguran terbuka sendiri bisa diakibatkan oleh ketidakterseediaannya lapangan kerja , tidak memenuhinya tenaga kerja yang ada dengan kesempatan kerja maupun kualifikasi pendidikan,dan tidak ingin bekerja.

2. Penegasan Secara Operasional

a) Angkatan Kerja (X1)

Angkatan kerja ialah seseorang yang berumur mulai dari 15 tahun atau lebih sedang melakukan kegiatan kerja atau sedang menganggur

b) Upah Minimum (X2)

Upah adalah suatu bentuk balasan atas apa yang dilakukan seseorang sebagai tenaga kerja kepada atasannya sesuai dengan hasil pekerjaannya tersebut,guna bisa memenuhi kebutuhannya

c) PDRB (X3)

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan jumlah output dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di suatu wilayah, yang dapat menyerap tenaga kerja dan berkontribusi kepada pendapatan nasional

---

<sup>31</sup> Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.159

<sup>32</sup> Ponirin dan Lukitaningsih, *Sosiologi*, (Medan : Yayasan Kita Menulis,2019), hal.145

d) Indeks Pembangunan Manusia (X4)

IPM merupakan angka atau *numeric* yang berguna sebagai penunjuk atas taraf hidup insan dalam suatu wilayah. Menandakan juga akan hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh wilayah atau negara.

e) Pengangguran Terbuka (Y)

Orang yang telah memasuki kelompok angkatan kerja, akan tetapi orang tersebut tidak mendapatkan jatah pekerjaan, tidak memiliki aktivitas yang menghasilkan maupun seseorang yang sedang mencari-cari kegiatan untuk menghasilkan pendapatan, maupun memang tidak mau bekerja.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian ini didasarkan pada buku pedoman skripsi FEBI IAIN Tulungagung tahun 2018. Terdapat tiga bagian dalam menyusun skripsi, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal : terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian utama terdiri dari:

Bab I pendahuluan yang mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, memaparkan tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah yang berisikan penegasan secara konseptual maupun operasional, serta sistematika skripsi.

Bab II landasan teori, yang berisi tentang teori yang membahas variabel pengangguran, angkatan kerja, upah minimum, PDRB , indeks pembangunan manusia, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian

Bab III metode penelitian, yang berisi pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian , menganalisis data.

Bab IV hasil penelitian, yang berisi tentang hasil . Bab V pembahasan, berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI penutup, mencakup kesimpulan dan saran

3. Bagian akhir, berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup